

**Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi
Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh :

**BAIHAKE AKBAR HADI
NPM 1721020155**



**PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2021 M**

**Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi
Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah
(Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Syariah

Oleh :

**BAIHAQI AKBAR HADI
NPM 1721020155**

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Pembimbing I : Dr.Iskandar Syukur, M.A

Pembimbing II : M.Yasin al Arif, S.H., M.H

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2021 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman maka terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat pada judul, yaitu: “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”, maka dari itu dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

1. **Peran** adalah bagian yang dimainkan seseorang ataupun sekelompok orang dalam suatu hal.
2. **Komisi Pemilihan Umum** adalah lembaga yang bertugas dalam pemilihan umum, baik itu eksekutif maupun legislatif.
3. **Sosialisasi Politik** adalah suatu komponen utama dari sebuah sistem politik karena dengan terdapatnya sosialisasi politik maka seorang individu bisa mempelajari politik baik secara disadari ataupun tidak disadari oleh masing-masing individu tersebut.
4. **Pemilih Pemula** adalah seseorang yang baru pertama kali melakukan pemilihan umum yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu.

5. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** adalah Tentang Pemilihan Umum memberikan jaminan bagi pemilih pemula yang pada berusia 17 tahun guna menyalurkan hak pilih nya.
6. **Fiqh Siyasah** adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yaitu melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan ataupun yang berkaitan dengan tugas KPU kepada masyarakat di dalam penelitian ini sosialisasi dilakukan terkhusus kepada pemilih pemula agar memilih pemimpin tidak dilakukan secara asal namun dilakukakan berdasarkan penyelidikan kepada calon-calon tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (PEMILU) di Indonesia dilakukan pertama kali pada bulan September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan pada bulan Desember 1955 untuk memilih Konstituante dan terus dilakukan sampai sekarang². Setelah masa orde baru yaitu era reformasi terdapat penambahan yang dapat dilakukan oleh PEMILU yaitu pemilihan Presiden dari tahun 2004 hingga sekarang, serta pemilihan Gubernur pada tahun 2007, dan pemilihan Walikota. PEMILU dilakukan dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia)

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016).h. 4.

² Harmaily Kusnardi, Moh & Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indaonesia dan CV Sinar Bakti, 2010). h. 243.

sejak jaman Orde Baru dan kemudian berkembang pula asas JURDIL (Jujur dan Adil) di era Reformasi.

Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai salah satu sarana demokrasi dan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin yang aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat.³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang berwenang dalam mengurus pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memiliki beberapa tugas pokok sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang salah satu nya yaitu menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.⁴

Pemilih yang berhak memilih yaitu Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Namun, permasalahannya adalah apakah mereka yang baru genap berusia 17 tahun tersebut yang dapat dikatakan sebagai pemilih pemula dapat mengetahui pentingnya hak pilih mereka serta apakah mereka benar-benar mengetahui siapa yang akan mereka ikuti tanpa intervensi dari pihak lain? Para pemilih

³ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2018, <https://doi.org/10.24114/Jupiiis.V10i1.8407>. H. 58.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum."

terkhusus pemilih pemula haruslah mengetahui siapa yang akan mereka pilih seperti latar belakangnya, visi dan misinya, apakah orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut adalah orang yang amanah, dapat dipercaya, jujur, dan memihak rakyatnya bukan malah memihak partai politiknya.

Serta adapula yang memilih suatu pasangan calon (Paslon) dikarenakan melihat parasnya atau fotonya dalam kartu suara yang menarik bukan dari pengalaman di dunia politik. Hal tersebut merupakan masalah besar, karena nantinya mereka sendiri (pemilih) menyesal dikarenakan siapa yang mereka pilih mengecewakan rakyatnya. Pilihan yang mereka pilih secara asal akan menentukan bagaimana nasib bangsa dalam lima tahun kedepan.

Dari data yang diperoleh KPU Kota Bandar Lampung melaksanakan sosialisasi sesuai dengan 10 basis diantara nya adalah berkebutuhan khusus, keagamaan, keluarga, marginal, pemilih muda, pemilih pemula, perempuan, warga net, disabilitas, dan komunitas. Dalam metode sosialisasi nya itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung, jika secara langsung itu dengan melakukan sosialisasi sesuai dengan 10 basis tersebut dan jika secara tidak langsung itu menggunakan media sosial dengan cara mempromosikan bahwasannya dalam penggunaan hak pilih itu sangat penting dan menginformasikan bahwa memilih pemimpin itu sangat penting dalam menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan, untuk itu adapun hasil wawancara dengan anggota komisioner KPU Kota Bandar Lampung bahwasannya tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2015 dan 2020 dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 ada di angka 66,63 % dan di tahun 2020 ada diangka

69,13 % , pada pemilihan legislatif (PILEG) tahun 2014 itu ada di angka 74,55 % , dan tingkat partisipasi pemilihan legislatif (PILEG) di tahun 2019 tingkat partisipasi nya adalah 88,61 % .⁵

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Atau seperti dijelaskan oleh Alex Thio sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu memperoleh pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, dan sikap politik.⁶

Media sosial sangat dekat kaitannya dengan pemilih pemula, media sosial tidak dapat lepas dari masyarakat khususnya pemilih pemula. Media sosial dapat berupa Facebook, Instagram, Twitter, dsb. Banyak partai politik yang memanfaatkan media social sebagai sarana komunikasi politik. Dikarenakan media sosial lebih luas jangkauannya serta mudah diakses. Tidak hanya dampak positif namun juga terdapat dampak negatif dalam penggunaan media sosial. Banyaknya kabar yang simpang siur serta berita hoax yang disajikan untuk mendukung atau menjatuhkan salah satu kandidat dan pemilih pemulapun kebanyakan digiring oleh partai politik tersebut. Maka dari itu diperlukan sosialisasi politik yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, pihak yang memiliki wewenang serta peran yaitu Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota kepada masyarakat.”

⁵ Lampung, “Rensta Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung 2015-2019.”

⁶ Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). H. 135.

Berdasarkan latar belakang diatas secara eksplisit penulis tertarik untuk melakukan penyelidikan dan menulis serta menganalisisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Jadi dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan identifikasi masalah nya adalah sebagai berikut :

1. PEMILU dilakukan dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) sejak jaman Orde Baru dan kemudian berkembang pula asas JURDIL (Jujur dan Adil)
2. Pemilih yang berhak memilih yaitu Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
3. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula.

Maka dari itu dilihat dari uraian identifikasi masalah diatas, dapat disimpulkan batasan masalahnya dalam fokus penelitian skripsi yang diteliti yaitu Peran Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Untuk melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara serta studi dokumentasi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap peran Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan politik bagi pemilih pemula sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah diatas, adapun tujuan serta kegunaan dari permasalahan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan politik bagi pemilih pemula sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap pemberian sosialisasi politik bagi pemilih pemula sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Dalam hal ini manfaat penelitian penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu :

- A. Secara Teoritis, bermanfaat bagi praktisi ataupun akademisi di bidang ilmu pengetahuan khususnya, dalam hal sosialisasi politik bagi pemilih pemula pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- B. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam ilmu syariah pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung. Dari hasil penelitian di lapangan dapat menjadi pedoman mengenai sosialisasi politik bagi pemilih pemula pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya.⁷

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam kajian ini, untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha mencari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya tulisan orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Tujuannya adalah untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian. Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini tidak mengandung unsur plagiatisme dan Peneliti sangat yakin belum ada yang mengkaji penelitian seperti

⁷ Susiadi, *Metodeologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014). h. 35

ini. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa referensi jurnal dan skripsi terdahulu diantaranya meliputi :

1. Oleh Muhammad Said Ode (2019), dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Surabaya Dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilwali Surabaya 2015” dimana masalah yang diangkat bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Surabaya dalam menarik minat partisipasi pemilih pemula di Pilwali Surabaya tahun 2015. Hasil dari penelitian ini yaitu Komisi Pemilihan Umum Surabaya menunjukkan betapa pentingnya sebuah institusi politik dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi di aras lokal seperti Surabaya.⁸
2. Oleh Annisa Putri (2019), dari Universitas Lampung dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Peningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019” dimana masalah yang diangkat adalah bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Hasil dari penelitian ini yaitu Komisi Pemilihan Umum melakukan program-program kegiatan yang dimana itu adalah usaha nya untuk mengajak pemilih pemula agar berpartisipasi dalam pemilu, dan terbukti ada peningkatan partisipasi pemilih pemula, strategi yang dilakukan adalah dengan sosialisasi serta kegiatan-kegiatan lain nya.⁹

⁸ Muhammad Said Ode, “Peran Komisi Pemilihan Umum Surabaya Dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilwali Surabaya 2015” (Skripsi, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019).

⁹ Annisa Putri, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Peningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019” (Skripsi, Universitas Lampung, 2019).

3. Oleh Fety Noviaty, Erna Octavia (2018) jurnal pendidikan sosial dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat” dimana salah satu masalah yang diangkat yaitu Bagaimanakah program kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pontianak dalam menumbuhkan partisipasi politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Pontianak Barat. Hasil dari penelitian ini yaitu Program Kerja dalam bentuk sosialisasi pada kalangan SMA sederajat sebagai pengenalan kepada pemilih pemula akan pentingnya ikut terlibat dalam pemilu, atau dengan mengunjungi beberapa elemen masyarakat yang memang membutuhkan penyuluhan akan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi atau terhadap masyarakat yang memang belum paham mengenai politik. Oleh karena, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota pontianak kecamatan Pontianak barat sebenarnya lebih banyak berfungsi sebagai koordinator, sehingga tidak terlalu banyak kegiatan dan aktivitas yang dilakukan berbentuk program kegiatan kepada masyarakat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas secara eksplisit penulis tertarik untuk melakukan penyelidikan dan menulis serta menganalisisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”

¹⁰ Fety Novianty and Erna Octavia, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KOMISI PEMILIHAN UMUM) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat,” *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2018.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan untuk mencari jawaban permasalahan yang dapat di pertanggungjawabkan. Untuk itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk sosialisasi politik. Dalam hal ini langsung mengamati mengenai sosialisasi politik bagi pemilih pemula pada Komisi Pemilihan Umum kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif,yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data penulis menggunakan observasi,wawancara,dan dokumentasi. Serta dengan pendekatan hukum normative-empiris di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa ada intervensi dari pihak lain. Dalam hal ini penulis memperoleh sumber

pertama yaitu badan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang mengetahui secara langsung bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua digunakan sebagai penunjang dari data primer. Dalam hal ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, bukuharian, dan seterusnya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan adalah suatu cara yang dilakukan peneliti agar dapat memudahkan proses pengambilan data. Karena peneliti melakukan penelitian lapangan, maka dari itu teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Adapun tempat yang akan diobservasi adalah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara terbagi menjadi dua yaitu

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015). 9.

wawancara struktur dan nonstruktur. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada badan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.¹² Dokumen-dokumen tersebut dapat diambil dari buku harian, surat pribadi, dan otobiografi.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses dalam memproses ringkasan data yang sudah ada dengan menggunakan metode-metode tertentu. Pengolahan data yang umumnya dilakukan meliputi : Pemeriksaan Data (Editing), Koding, Rekontruksi Data, dan Sistematis Data.

5. Analisis Data

Menurut Lexy J.Moleong (2000), analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹³

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

¹² Susiadi, *Metodeologi Penelitian...*, 115.

¹³ *Ibid*, h. 128

Selain menekan analisis nya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada implementasi terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Ini bukan berarti bahwa analisis kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Kaitan hal tersebut dengan skripsi ini adalah peneliti mencoba menganalisis berdasarkan kondisi nyata dilapangan serta pernyataan dari sumber primer. Metode deduktif-analisis digunakan pada saat penulis mencari, mengolah, dan menulis skripsi ini berdasarkan implementasi peran Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula. Serta analisis fiqh siyasah terhadap implementasi peran Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan sosialisasi politik bagi pemilih pemula.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika struktur pembahasan penelitian yang dilakukan, bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi yang disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain.

Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan : halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstrak.

1. Bab I membahas mengenai Pendahuluan yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

2. Bab II membahas mengenai Landasan teori yang terdiri dari Fiqh Siyasah, Teori Sosialisasi Politik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Bab III membahas mengenai Deskripsi Objek Penelitian yang membahas mengenai Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung serta Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
4. Bab IV membahas mengenai Analisis Penelitian, yang terdiri dari Analisis Data Penelitian dan Temuan Penelitian.
5. Bab V merupakan Penutup yang berisi Simpulan, Rekomendasi, Daftar Rujukan, dan Lampiran-lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Masyarakat muslim mengenal tiga katagori hukum yang berlaku yaitu hukum syariat, hukum fiqh, dan siyasah syar'iyah. Ketiga hukum berbeda pengertian namun, memiliki hubungan yang erat satu sama lainnya. Pada penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai Fiqh Siyasah. Fiqh siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Kata fiqh sendiri berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa fiqh adalah “pemahaman yang mendalam”. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang ddapat diambil manfaat darinya”¹⁴. Secara definitif fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang tafsili¹⁵.

Kata “siyasah” sendiri berasal dari kata “*sasa*”, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta

¹⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam....* h. 2.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014)..... h. 2-3.

mengatur keadaan. Sementara Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.¹⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang mengatur mengenai ketatanegaraan dalam bangsa dan negara agar tercapai kemaslahatan bagi bangsa dan negara itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli mengenai pembagian ruang lingkup fiqh siyasah. Ada yang membaginya menjadi tiga, empat, lima, ataupun delapan bagian. Namun perbedaan ini hanyalah bersifat teknis bukan prinsip.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-ahkam al-sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup sebagai berikut¹⁷ :

- a. Siyasah Dusturiyyah (peraturan perundang-undangan)
- b. Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter)
- c. Siyasah Qadha'iyah (peradilan)
- d. Siyasah Harbiyyah (hukum perang)
- e. 'Idariyyah (administrasi negara)

Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar'iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bagian yaitu¹⁸ :

- a. Siyasah Qadhaiyyah (politik peradilan)
- b. Siyasah Dauliyyah (politik hubungan internasional)
- c. Siyasah Maliyah (politik ekonomi dan moneter)

¹⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam....* h.4.

¹⁷ *Ibid.*, h.14.

¹⁸ *Ibid.*

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu¹⁹ :

- a. Siyasah Dusturiyyah (peraturan perundang-undangan)
- b. Siyasah Tasyri'iyyah (politik hukum)
- c. Siyasah Qadha'iyah (peradilan)
- d. Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter)
- e. Siyasah Dauliyyah (politik hubungan internasional)
- f. Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- g. Siyasah Harbiyyah (hukum perang)

Secara garis besar fiqh siyasah dibagi menjadi tiga bagian pokok saja, yaitu : siyasah dusturiyah (politik perundang-undangan), siyasah dauliyah (politik hubungan internasional), dan siyasah maliyah (politik keuangan). Untuk mengerucutkan penelitian peneliti akan membahas mengenai siyasah dusturiyah sebagai pendekatan kepada masalah yang peneliti teliti²⁰.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara. Siyasah dusturiyah mempunyai beberapa konsep antara lain konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan negara), legislasi (perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura²¹.

¹⁹ *Ibid.*, h. 15.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h. 177.

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan pakar Islam menanggapi permasalahan syura dan demokrasi. Sebagian memandang syura dan demokrasi adalah dua hal yang identik, sebagian lagi memandang dua konsep yang berlawanan, sedangkan yang lain memandang bahwa keduanya mempunyai persamaan yang erat namun tetap memiliki perbedaan-perbedaan. Syura berasal dari *syu-wa-ra* yang secara bahasa memiliki arti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” dimana musyawarah sendiri memiliki arti segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan²².

Bentuk-bentuk lain dari *syawara* adalah *tasyawara*, yang memiliki arti berunding, saling betukar pendapat, *syawir* yang artinya meminta pendapat atau musyawarah. Sebagaimana halnya syura, demokrasi juga menekankan musyawarah dalam mengambil keputusan²³. Jadi dapat disimpulkan syura atau musyawarah merupakan sebuah metode untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara bertukar pikiran, saling memberikan pendapat agar didapatkan suatu kesepakatan bersama. Sedangkan, Demokrasi diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai musyawarah diantaranya yaitu:

²² *Ibid.* h. 214.

²³ Hasbi Ammiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000). h.18.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Al-Imran [3]: 159).

Di dalam kandungan ayat tersebut dijelaskan mengenai keharusan seorang umat muslim untuk melakukan musyawarah apabila terjadi permasalahan sehingga dapat ditemukan sebuah jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang ada.

3. Pandangan Siyasah Dusturiyyah terhadap Pemberian Sosialisasi Politik untuk Pemilih Pemula

Permasalahan dalam bidang fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu sisi dengan umat di sisi lain dengan kelembagaan yang ada di masyarakat. Dalam siyasah dusturiyah hanya sebatas membahas peraturan perundang-undangan tentang kenegaraan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah agama dan merupakan kemaslahatan umat serta pemenuhan kebutuhannya²⁴.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum, meliputi hal-hal sebagai berikut²⁵ :

²⁴ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003)...., h. 45.

²⁵ *Ibid.*

a. Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya.

Imamah adalah ism mashdar atau kata benda dari kata amama yang berarti "di depan". Yang di depan disebut "imam". Itulah sebabnya dalam kehidupan sehari-hari, kata "imam" sering diartikan sebagai orang yang memimpin shalat jamaah. Kata imam secara harfiah berarti bahwa orang yang berdiri di depan dan menjadi teladan bagi orang-orang di belakangnya. Karena itu, imam mengacu pada orang yang memimpin orang lain²⁶.

b. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ada yang disebut kafir dzimi dan ada pula yang disebut musta'min. Kafir dzimi adalah warga nonmuslim yang menetap selamanya, serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Sedangkan Mustamin, adalah orang asing yang menetap untuk sementara, dan juga harus dihormati jiwanya, kehormatannya, dan hartanya²⁷.

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah²⁸:

- 1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- 2) Perlindungan terhadap kebebasan pribadi .
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.

²⁶ Moch. Fachrurrozi, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah," *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2015.h. 298

²⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*....,h. 63.

²⁸ *Ibid.*, h. 64.

- 4) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu²⁹:

“Hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki.”

c. Persoalan bai'at.

Menurut Ibn Khaldun, baiat adalah perjanjian untuk taat, dimana orang yang berbaiat dan bersumpah setia pada pimpinanya, bahwa ia akan menyelamatkan pandangan-pandangan yang diembannya dari pemimpin, baik merupakan perintah yang disenangi maupun tidak disenangi³⁰.

d. Persoalan *waliyul ahdi*.

Imamah itu dapat terjadi dikarenakan dua cara yaitu: pertama, dengan pemilihan *ahlul halli wal aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Penyerahan kekuasaan tersebut yang dimaksud dengan *waliyul ahdi*.³¹

e. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.

Secara bahasa, *ahlul halli wal aqdi* terdiri dari tiga kata. *Ahlul* berarti orang yang memiliki atau orang yang berhak, *Al-halli* berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *Aqdi* berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Jadi *ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang memiliki hak atau kewenangan untuk

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Hamzah Khaeriyah et al., “BAIAT DAN PERILAKU BERAGAMA,” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 2017. h.293.

³¹ Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah...*, h. 68.

menentukan, memecahkan, atau memutuskan suatu masalah, dan keputusan tersebut bersifat mengikat.³²

f. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pada masa pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak zaman pra-Islam. Wizarah telah dikenal pada masa Bani Israel, Mesir Kuno, dan Persia Kuno. Kata wizarah berasal dari kata al-wazr yang berarti berat. Dikatakan demikian lantaran seorang wazir memikul tugas yang berat. Dalam bahasa Arab dan Persia modern wazir memiliki pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.³³

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwasannya mengenai pemilih pemula termasuk kedalam lingkup pembahasan persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya. Hak untuk memilih dan dipilih masuk kedalam katagori yang disampaikan oleh Abu A'la al-Maududi yaitu kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.

Pemilih pemula merupakan Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Di dalam Islam sendiri pemilih pemula dapat dikatkan sama dengan anak yang sudah mumayyiz dan baligh.

Dalam Islam perkembangan manusia secara umum dibagi menjadi beberapa periode yaitu: Pertama, periode prenatal berupa masih janin didalam perut ibunya. Kedua, periode thufulah masa kanak-kanak dan masa kecil, yaitu setelah lahir hingga masa

³² Iskandar Syukur, "IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM PERANAN AHLU AL-HALLI WA AL-'AQDI," ASAS, 2019. h.52

³³ Nur Lailatul Musyafaah, "Ijtihad," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5 Nomor 2 (2010). h. 228.

sebelum tamyiz. Ketiga, periode tamyiz yaitu dari masa mumayyiz sampai masa baligh. Keempat, periode baligh yaitu perubahan dari masa tamyiz kemasa baligh. Kelima, periode ar-rusyd yaitu sempurna akal nya.

Mumayyiz merupakan anak yang sudah mencapai usia dimana anak dapat membedakan mana yang benar serta bermanfaat bagi dirinya dan mana yang salah serta merugikan dirinya. Sedangkan baligh, adalah anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Masa ini ditandai dengan beberapa hal yaitu: dengan munculnya beberapa perubahan fisik berupa bertumbuhnya rambut di beberapa bagian, mimpi basah, dan haidh untuk anak perempuan. Pada masa ini perkembangan tubuh dan akal anak telah mencapai kesempurnaan sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai tashorruif secara menyeluruh.

Di dalam al-Quran dijelaskan mengenai kecakapan umur atau dengan kata lain awal kedewasaan yaitu antara lain:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾

“Dan setelah Musa Cukup umur dan sempurna akal nya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Qashas [28]: 14).

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nur [24]: 59)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا



“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah mereka menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. An-Nisa [4]: 6)

Dari ketiga ayat diatas dapat dipahami bahwasanya apabila seorang anak telah cukup umur dan sempurna akal nya anak tersebut memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi dunia dan sudah dapat berfikir layaknya orang diatas mereka. Sehingga anak sudah memiliki hak untuk memilih siapa pemimpinnya.

Di dalam al-Quran juga dijelaskan mengenai memilih pemimpin yang baik yaitu antara lain :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An-nisa [4]: 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rosul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (Q.S. An-nisa [4]: 59).

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“*Jika ada tiga orang yang berpergian, hendaknya mereka memilih salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya*” (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Dari ayat dan hadits diatas dapat disimpulkan wajib hukumnya memilih seorang pemimpin, pemimpin yang adil, baik, amanah, dan yang lebih mengedepankan rakyat daripada dirinya sendiri. Di dalam al-quran juga dibahas mengenai kewajiban melakukan pengajaran agar orang lain mendapatkan ilmu dan bisa mengikutinya

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” (HR. Muslim 1893).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: “berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu” maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya jika kita menunjukkan suatu kebaikan dalam memberikan ilmu, apabila orang tersebut mengamalkannya. Maka, kita juga mendapatkan pahala yang sama. Manusia, diperintahkan oleh Allah untuk mencari ilmu, karena apabila kita mendapatkan ilmu kita dapat ditinggikan derajatnya.

Berdasarkan pemaparan dari ayat serta hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila anak yang sudah cukup umur serta baligh dapat membedakan mana yang benar

dan mana yang salah. Maka, ia sudah sama dengan orang di atasnya. Memiliki hak yang sama, begitupun dalam memilih pemimpin. Kita yang sepatutnya sudah dewasa, hendaknya memberikan pengajaran berupa ilmu-ilmu kepada anak tersebut. Agar, anak tersebut tidak salah jalan dan tidak mudah mempercayai hoax.

B. Teori Sosialisasi Politik

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi dapat dikatakan sebagai suatu makna dimana setiap individu berupaya menyelaraskan hidupnya ditengah-tengah masyarakat. Individu tersebut melakukan penyesuaian dengan tempat tersebut dengan memperhatikan masyarakat sekitar untuk berbuat maupun bertindak.³⁴

Alex Inkeles yang menyatakan bahwa :*“From sociological point of view, socialization refers to the process whereby individuals acquire the personal system properties-the knowledge, skill, attitudes, values, needs and motivations, cognitive, affective and conative patterns-which shape their adaptation to the physical and socio-cultural setting in which they live”*.³⁵

Senada dengan Inkeles, Fuller dan Jacobs mengemukakan, *“Socialization, in the most general sense, is the process through which individuals acquire the social knowledge and skills necessary to enable them to interact with others”*.³⁶

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses yang dilakukan suatu individu melekat secara alami untuk memperoleh

³⁴ Anwar, “Paradigma Sosialisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 11 No. 1 Januari-Juni 2018, h. 67

³⁵ Haryanto, *Sosialisasi Politik* (Yogyakarta: PolGov, 2018). h. 8.

³⁶ *Ibid.* 9.

pengetahuan, nilai, ataupun keterampilan lainnya agar mampu beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya.

2. Pengertian Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan politik. Proses sosialisasi politik dapat diperoleh secara sengaja maupun dengan tidak sengaja. Sosialisasi politik yang diperoleh secara sengaja yaitu melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Sedangkan secara tidak sengaja yaitu dari teman, keluarga, kehidupan sehari-hari, lingkungan dan sebagainya.³⁷

Menurut Dennis Kavanagh, sosialisasi politik ialah proses individu dapat belajar politik supaya mampu membentuk budaya politik di masyarakat. Sedangkan Almond menyatakan, sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan tingkah laku politik juga sebagai sarana suatu generasi untuk mewariskan patokan dan keyakinan politik kepada generasi berikutnya.³⁸

Dengan demikian, bisa dicermati bahwa sosialisasi politik merupakan proses untuk mendapatkan suatu informasi politik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan politik.

3. Agen Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik sudah mulai dilakukan saat masih kanak-kanak, sebelum anak masuk sekolah keluarganya yang menjadi agen pertama dan utama dalam sosialisasi politik. Keluarga berperan penting dalam sosialisasi politik. Hal itu dikarenakan

³⁷ Muhammad Teguh Wibowo and Effendi Hasan, "Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*, 2017. h. 538

³⁸ Haryanto, *Sosialisasi Politik*,... 13.

keluargalah yang menjadi panutan dan sumber informasi bagi pemilih utama. Anak-anak cenderung akan mengikuti orangtua mereka.

Agen adalah seseorang yang memiliki pengalaman empiris di bidang politik, contohnya pernah terjun dalam aktivitas politik, seperti mengikuti pemilihan anggota legislatif atau menjadi aktivis partai.³⁹

Dalam proses menyampaikan materi sosialisasi kepada masyarakat, agen bisa melakukan sendiri atau bersama-sama. Sebagai contoh, jika seseorang memperoleh pengetahuan politik dari lingkungan pekerjaannya, maka lingkungan ini bisa disebut bekerja sendiri dalam mentransfer pengetahuan politik, asalkan orang tersebut tidak mendapat pengetahuan yang sama dari agen lain.

Selain keluarga, agen sosialisasi politik yang tidak kalah penting adalah sekolah. Sekolah merupakan agen sekunder yang lebih luar dari keluarga. Pengetahuan-pengetahuan tertentu yang sering kali tidak diperoleh di keluarga maupun lembaga lain. Kurikulum dan peran para guru akan membentuk sikap maupun pandangan bagi muridnya tentang kehidupan, pengetahuan sosial, ekonomi, dan politik.

Selain keluarga dan sekolah, kelompok pergaulan pun memainkan peran penting sebagai agen sosialisasi politik. Adapun yang termasuk dalam lingkup kelompok pergaulan, antara lain kelompok bermain di masa remaja, kelompok persahabatan, atau kelompok sosial lain nya yang ada di sekitar tempat tinggal. Lebih spesifik, keikutsertaan dalam asosiasi perkumpulan berlatar tradisi, agama, ataupun etnisitas

³⁹ *Ibid.*

ternyata juga menjadi sarana yang menopang bagi berlangsungnya sosialisasi politik.

Agen sosialisasi politik lainnya adalah kontak-kontak politik langsung. Maksudnya, melalui sentuhan yang berkaitan langsung dengan politik, disadari atau tidak, seseorang mengalami proses sosialisasi politik. *Public Figure* memiliki peranan penting dalam membentuk orientasi politik terutama bagi kaum muda pemilih pemula. *Public figure* merupakan *role model* dimana pola pikir dan prilakunya diikuti dan dijadikan panutan oleh orang banyak.

C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu mekanisme untuk memilih pemimpin. Ada beberapa macam definisi mengenai pemilu⁴⁰, diantaranya adalah pendapat Nohlen yaitu pemilihan umum (pemilu) adalah satu-satunya metode demokratik untuk memilih wakil rakyat.

Kemudian R. William Liddle menyatakan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsi kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh *elit* politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat

⁴⁰ Kemal Pito, Toni Andrius, Efriza, & Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2019). h. 259.

jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.⁴¹

Bagi Aurel Croissant dkk., Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Namun demokrasi perwakilan sangat bergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Sarana penting untuk mencapai sasaran setelah sistem pemilu.

Salah satu fungsi dan tujuan pemilu dalam negara demokrasi adalah memastikan terjadinya pembatasan kekuasaan terutama pada aspek *limit of power*, yaitu pembatasan kekuasaan agar jabatan kekuasaan dalam suatu negara tidak dipangku oleh seseorang atau kelompok orang dalam waktu yang tak terbatas. Ketiadaan pembatasan kekuasaan dari aspek *limit of power* bukan saja menciptakan adanya pemangku jabatan yang tidak terevaluasi, tetapi lebih jauh berpotensi membuat pemangku jabatan tumbuh menjadi penguasa tirani dan otoriter yang pada gilirannya menjadi pemicu digunakannya cara-cara di luar konstitusi *outside the constitution* untuk menghentikan praktik tiran atau otoriter tersebut.⁴²

Pada hakikatnya pemilu merupakan penyalur aspirasi rakyat. Dengan adanya pemilu menandakan negara tersebut adalah negara demokratis yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpinnya apakah sesuai dengan keinginannya atau tidak.

⁴¹ Efriza, *Political Explore* (Bandung: Alfabeta, 2012). h. 358.

⁴² Rahmat Bagja Dayanto, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu* (Jakarta: Rajawali, 2020). h. 8.

Pemilihan umum di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu yang dilaksanakan pertama kali ini tercatat menjadi pemilu paling Demokratis; tidak ada pembatasan partai-partai, dan tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai-partai sekalipun kampanye berjalan seru⁴³. Pemilu pada masa orde baru tidak berjalan secara demokratis, hal ini dikarenakan penyelenggaraan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru memiliki cacat kronis. Salah satunya dalam hal penyelenggara pemilu adalah pemerintah dimana didominasi oleh partai yang berkuasa sehingga berpeluang terjadinya kecurangan. Setelah orde baru berakhir, terselenggaralah pemilu masa transisi, yaitu pemilu tahun 2004.⁴⁴

Pada era reformasi, peran pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu dilucuti, peran mereka digantikan oleh kekuatan civil society, dalam hal ini dilakukan oleh lembaga yang dibuat secara mandiri dan bertugas secara berkelanjutan. Lembaga ini disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga ini diisi oleh personalia yang dipilih oleh DPR melalui sebuah proses seleksi '*fit and proper test*'. Dengan demikian KPU lalu menjadi sebuah institusi penyangga *political society*, yang dipundaknya diletakkan tanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang efektif. Pemilu diselenggarakan memiliki beberapa tujuan yaitu: sebagai pendidikan politik, memilih pemerintah yang bersih (*clean goverment*), baik dan berdaya kemampuan efektif memecahkan masalah serta memenuhi kepentingan masyarakat. (*good govermance*).⁴⁵ Pemilu tahun 2004

⁴³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017). h. 474

⁴⁴ Amin Suprihatini, *Lembaga Penyelenggara Pemilu* (Klaten: Cempaka Putih, 2018). h. 1.

⁴⁵ Zinuddin Maliki, *Sosiologi Politik Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018). h.137.

adalah pemilu pertama yang diselenggarakan oleh satu badan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yaitu Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Langsung artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa perantara. Asas umum, artinya setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak untuk mengikuti pemilu. Pemilihan umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Bebas, artinya semua warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya. Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui pihak manapun. Dan yang terakhir Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil

⁴⁶ Indriana, *Pemilu Di Indonesia* (Tangerang: Loka Aksara, 2019). h.21.

kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilihan umum terdiri atas:

- a. Komisi Pemilihan Umum
- b. Badan Pengawas Pemilu
- c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

2. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat KPU merupakan penyelenggara pemilu permanen. Komisi pemilihan umum adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen). Pemilihan umum yang diselenggarakan berupa pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, DPD, DPR, DPRD, dan Presiden dan wakil presiden. Kedudukan KPU tidak sejajar dengan lembaga-lembaga Negara lainnya. Karena tidak terdapat di dalam Undang-Undang. Wewenang yang dimiliki oleh KPU tertuang dalam pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang dasar 1945 yaitu pemilihan umum diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggaraan pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.⁴⁷

⁴⁷ Suprihatini, *Lembaga Penyelenggara Pemilu....* h. 2.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dibedakan dalam dua kegiatan pemilihan yaitu: pertama, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota; kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden.⁴⁸

Kedudukan KPU tidak sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya yang kedudukan dan wewenangnya diatur oleh Undang-Undang dasar 1945. Hal tersebut dikarenakan dalam pasal 22 E ayat (5) tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Namun, nama KPU telah disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.⁴⁹

KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia yaitu di Jakarta. Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal. Jumlah anggota KPU sebanyak tujuh orang. Keanggotaan KPU terdiri atas ketua yang merangkap menjadi anggota-anggota. Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama. Masa keanggotaan KPU selama lima tahun terhitung sejak pengucapan jumlah/janji. Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, calon anggota KPU yang baru harus sudah diajukan dengan memerhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu.⁵⁰ Ketua KPU mempunyai tugas sebagai berikut pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁴⁸ Amin Suprihatini, *Pemilu Dari Masa Ke Masa* (Klaten: Cempaka Putih, 2008). h. 21.

⁴⁹ Muhammad Ilham Wahyudi and M. Fachri Adnan, "Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang 2018," *Jurnal Perspektif*, 2019. h. 159.

⁵⁰ Suprihatini, *Lembaga Penyelenggara Pemilu....* h. 11.

- a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU
- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam.
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kegijakan dan kegiatan KPU
- d. Menandaangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.

Adapun tugas dan kewenangan KPU tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
- d. Mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
- e. Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi.
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai Daftar pemilih.
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu
- h. Mengumumkan calon anggota DPR dan anggota DPD, dan Pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.

- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan KPU sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- b. Menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- c. Menetapkan peserta pemilu.
- d. Menetapkan dan mengembangkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu presiden dan wakil presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.

- f. Menetapkan dan memungkinkan perolehan jumlah kursi anggota DPR anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPLN;
- i. Mengangkat, Membina, dan memberhentikan anggota KPU provinsi anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPLN.
- j. Menjatuhkan sanksi administratif atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengedit Dana kampanye pemilu dan mengumpulkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tinjauan Tentang Sosialisasi Politik

Sebelum lebih jauh mengetahui tentang sosialisasi politik perlu untuk mengetahui apa itu sosialisasi dan apa itu politik. Berbagai kalangan memberi pengertian mengenai sosialisasi diantaranya yaitu :

- a. Alex Inkeles yang menyatakan bahwa : *“from sociological point of view, socialization refers to the process where by individuals acquire the personal system properties-the knowledge, skill, attitudes, values, needs and motivation, cognitive, affective and conative patterns-which shape their adaptation to the physical and socio-cultural setting in which they live”*. Senada dengan Inkeles, Fuller dan Jacobs mengemukakan, *“Socialization, in the most general sense, is the process through which individual acquire the social knowledge and skill necessary to enable them to interact with others”*⁵¹
- b. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt memberi batasan sosialisasi sebagai “suatu proses dengan mana seseorang menghayati (mendarahdagingkan, *internalize*) norma-norma kelompok dimana ia hidup sehingga timbullah diri yang unik”
- c. David B. Brinkerhoff dan Lynn K. White memberikan penekanan yang berbeda yaitu “sosialisasi merupakan suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlykan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial”
- d. James W. Vander Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.”⁵²

Dari pemaparan mengenai sosialisasi diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan proses seorang individu untuk memahami lingkungan sekitarnya sehingga termotivasi atau timbul keinginan dengan apa yang ada dilingkungan tersebut baik itu berupa sikap, nilai, dan perilaku.

⁵¹ Haryanto, *Sosialisasi Politik* (Yogyakarta: PolGov, 2018). h. 9.

⁵² Damsar, *Pengantar Sosialisasi Politik* (Jakarta: Kencana, 2015). h. 152

Sedangkan politik sendiri menurut Rod Hague et al “politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya. Kemudian Andrew Heywoo memaparkan “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamademenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama”.⁵³

Pengertian sosialisasi politik dapat dipahami dengan menambahkan atau menggabungkan kedua unsur diatas yaitu sosialisasi dan politik. Namun, agar lebih memahami penulis akan memaparkan pengertian sosialisasi politik dari para ahli yaitu antara lain :

- a. Michael Rush dan Phillip Althoft berpendapat dalam bukunya *Sosiologi Politik* (2003) bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi serta bertanggungjawab dalam kehidupan politik. Proses penyerapan nilai-nilai politik dipengaruhi oleh para perantara yang dinamakan agen sosialisasi politik. Agen sosialisasi politik tersebut meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, atau teman sejawat dan media massa.⁵⁴

⁵³ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*....h. 16.

⁵⁴ Muhammad Teguh Wibowo and Effendi Hasan, “Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*, 2017. h. 541

- b. A. Thio berpendapat dalam bukunya *Sociology: An Introduction* (1989) sosialisasi politik merupakan proses dengan mana individu-individu memperoleh pengetahuan. Kepercayaan-kepercayaan, dan sikap politik.⁵⁵
- c. Gabriel A. Almond dalam buku *Perbandingan Sistem Politik* membuat batasan tentang sosialisasi politik “sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan anak-anak sejak masa kanak-kanaknya, belajar memahami sikap-sikap dan harapan-harapan politik yang hidup dalam masyarakat.”⁵⁶

Sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik yang ada.⁵⁷ Sosialisasi politik merupakan mata rantai terpenting diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Hal itu disebabkan sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik.

Dalam sosialisasi politik terdapat agen-agen yang memiliki peranan penting untuk menyebarluaskan sosialisasi politik yaitu antara lain dimulai dari orang terdekat yaitu keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, dan media massa.

⁵⁵ Damsar, *Pengantar Sosialisasi Politik....* h.153.

⁵⁶ *Ibid.* h.153-154

⁵⁷ Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik....* h. 135.

Sosialisasi politik dimulai pada masa kanak-kanak. Sebelum seorang anak masuk sekolah, keluargalah yang menjadi agen utama sosialisasi politik. Dengan masuknya anak ke sekolah, maka yang berperan menjadi agen sosialisasinya adalah keluarga dan sekolah. Yang di pelajari anak tersebut dapat berupa siapa yang menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, maupun walikota di daerahnya. Sekolah dan orang tua mempengaruhi anak kepekaan akan pentingnya politik. Anak – anak juga mengembangkan sikap-sikap tertentu terhadap pemerintah pada umumnya, khususnya terhadap politisi. Namun, kepercayaan mereka terhadap pejabat pemerintah merosot seiring dengan bertambahnya usia. Sosialisasi politik berlanjut di masa ketika anak-anak telah tumbuh menjadi remaja dan pemuda. Di masa-masa seperti ini kepercayaan mereka di pengaruhi oleh teman-teman, keluarga, dan rekan-rekannya.⁵⁸ Media massa kini semakin mudah diakses seiring dengan perkembangan zaman, media massa, baik media cetak, seperti surat kabar maupun majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan internet, semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi pemikiran, cara pandang, cara pikir, cara tindak, dan sikap politik seseorang.

Transmisi nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap politik, dan harapan politik kepada individu maupun kelompok orang tertentu dilakukan melalui beberapa cara, antara lain⁵⁹:

a. Imitasi

Peniruan (imitasi) merupakan mekanisme sosialisasi yang paling dikenal oleh umat manusia. Hal yang pertama kali dikenal dalam hidup seorang anak manusia didapatkan

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Damsar, *Pengantar Sosialisasi Politik....* h. 166.

melalui proses peniruan. Proses peniruan merupakan suatu bentuk transmisi awal terhadap nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap dan harapan. Termasuk dalam aspek politik dari kehidupan kepada anak oleh orang yang lebih dewasa, terutama orang tua dalam keluarga. Proses ini dikenal dengan sosialisasi primer.

Peniruan dapat dilakukan orang dewasa hampir semua orang, peniruan dapat dilakukan baik secara pasif maupun aktif. Peniruan pasif dilakukan dengan meniru apa adanya secara utuh. Sedangkan peniruan kreatif merupakan peniruan yang dilakukan dengan melakukan modifikasi dan inovasi terhadap apa yang ditiru, sehingga terdapat suatu hal yang beda dari apa yang ditiru, sehingga terdapat suatu hal yang beda dari apa yang ditiru.

b. Intruksi

Perintah (intruksi) merupakan penyampaian sesuatu yang berisi amar atau keputusan oleh orang atau pihak yang memiliki kekuasaan (ordinat) kepada orang yang tunduk atau dipengaruhi orang yang memiliki kekuasaan (subordinat) untuk dilaksanakan. Intruksi politik biasanya berlangsung pada institusi yang berkaitan dengan aspek politik dari kehidupan seperti Negara atau partai politik.

c. Desiminasi

Desiminasi politik sering dilakukan oleh para anggota legislative dan aparat birokrasi untuk memberi tahu atau menyebarluaskan informasi tentang suatu agenda politik .

d. Motivasi

Politik merupakan suatu mekanisme sosialisasi politik untuk membentuk sikap, kalau bisa pada tahap perilaku, seseorang atau kelompok orang tentang suatu nilai-nilai, kepercayaan, pengetahuan, sikap politik, ataupun harapan politik tertentu.

e. Penataran

Pada masa orde baru penataran dimansyurkan dengan naman penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). P4 merupakan suatu bentuk sosialisasi politik untuk menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan pancasila.

4. Tinjauan Tentang Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan seseorang yang baru pertama kali melakukan pemilihan umum yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih yang mempunyai hak pilih dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan undang-undang pemilu. Pengetahuan politik pada pemilih pemula bisa dikatakan rendah. Hal itu lantaran pemilih pemula masih labil dalam memilih. Masa labil tersebut dicirikan belum memiliki idiologi politik yang jelas sehingga implementasinya tidak berafiliasi pada satu kelompok partai politik manapun. Selain hal tersebut masa labil juga dicirikan kurangnya ketertarikan kepada kehidupan politik.⁶⁰ Pemilih pemula melakukan pemilihan berdasarkan factor lingkungan. Pemilih pemula sangat rentan dipengaruhi

⁶⁰ Wibowo and Hasan, "Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Lingkungan Keluarga.".... h. 539.

oleh kepentingan-kepentingan tertentu terutama dari orang terdekat terutama keluarga, teman, dan kerabat.

Sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula sangat penting mengingat suara yang dihasilkan mencapai 20-30% dan juga perlu adanya transfer pengetahuan politik, tidak hanya yang terkait dengan berbagai hal tentang pemilu seperti sistemnya, tahapannya, dan lembaga penyelenggaranya tetapi lebih dari itu terkait juga dengan arti penting pemilu bagi bangsa dan Negara, untuk itu muatan dalam sosialisasi pemilu sebagai bagian dari pendidikan pemilih harus dapat mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang utuh. Terdapat tiga kompetensi penting yang harus dimiliki oleh pemilih pemula adalah kompetensi kewarganegaraan yang di adopsi dari pendapar Branson (1999:8) yaitu⁶¹:

- a. *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang harus diketahui oleh pemilih pemula.
- b. *Civic Skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris pemilih pemula yang relevan; dan
- c. *Civic Disposition* (watak kenegaraan), yang mengisyaratkan pada karakter public maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

⁶¹ Novianty and Octavia, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KOMISI PEMILIHAN UMUM) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat." h. 295.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ammiruddin, Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Baik, Indonesia. *BUKU PINTAR PEMILU 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Damsar. *Pengantar Sosialisasi Politik*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Dayanto, Rahmat Bagja. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Jakarta: Rajawali, 2020.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efriza. *Political Explore*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Haryanto. *Sosialisasi Politik*. Yogyakarta: PolGov, 2018.
- Indriana. *Pemilu Di Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kartiwa, Asep. *Pengantar Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Kusnardi, Moh & Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indaonesia dan CV Sinar Bakti, 2010.
- Lampung, KPU Kota Bandar. "Rensta KPU Kota Bandar Lampung 2015-2019." Bandar Lampung, 2016.
- Maliki, Zinuddin. *Sosiologi Politik Makna Kekuasaan Dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, 2018.
- Pito, Toni Andrius, Efriza, & Fasyah, Kemal. *Mengenal Teori-Teori Politik : Dari*

Sistem Politik Sampai Korupsi. Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.

Raga Maran, Rafael. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.

Suprihatini, Amin. *Lembaga Penyelenggara Pemilu*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.

———. *Pemilu Dari Masa Ke Masa*. Klaten: Cempaka Putih, 2008.

Susiadi. *Metodeologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Suteki & Galang Taufani. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal

Fachrurozi, Moch. “Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah.” *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2015.

Khaeriyah, Hamzah, Ag Dosen, Stain Sorong, and Jurusan Dakwah. “BAIAT DAN PERILAKU BERAGAMA.” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 2017.

Musyafaah, Nur Lailatul. “Ijtihad.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5 Nomor 2 (2010).

Novianty, Fety, and Erna Octavia. “Peran KPU (KPU) Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat.” *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2018.

Nur Wardhani, Primandha Sukma. “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum.” *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 2018. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>.

Wahyudi, Muhammad Ilham, and M. Fachri Adnan. “Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Padang 2018.” *Jurnal Perspektif*, 2019.

Wibowo, Muhammad Teguh, and Effendi Hasan. “Sosialisasi Politik Bagi Pemilih

Pemula Di Lingkungan Keluarga.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah*, 2017.

Syukur, Iskandar. “IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM PERANAN AHLU AL-HALLI WA AL-‘AQDI.” ASAS, 2019.

Internet

KPUbdl. “Jumlah DPTb Pilkada Kota Bandar Lampung 25.882 Pemilih.” *KPU Kota Bandar Lampung*. 2020.

Skripsi

Putri, Annisa. “Strategi KPU Kota Bandar Lampung Dalam Peningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilpres 2019.” Skripsi, Universitas Lampung, 2019.

Said Ode, Muhammad. “Peran KPU Surabaya Dalam Menarik Minat Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilwali Surabaya 2015.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang. “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 2017.

Wawancara

Amir, Badaruddin, “Peran KPU Dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ”, *Wawancara*, April 22, 2021.

Hamami, “Peran KPU Dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ”, *Wawancara*, April 22, 2021.

Kartika, Ika, “Peran KPU Dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ”, *Wawancara*, April 22, 2021.

Triyadi, Dedi, “Peran KPU Dalam Memberikan Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 ”, *Wawancara*, April 22, 2021.